



# Optimalisasi *Blue Economy* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Kepulauan Sangkarrang

Nasir<sup>1\*</sup>, Musa<sup>2</sup>, Salmah Harun<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Makassar

<sup>23</sup> Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan potensi *Blue Economy* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan di Kepulauan Sangkarrang. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan informan kunci dari kalangan masyarakat pesisir serta pihak pemerintah daerah. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai potensi ekonomi biru yang dimiliki Kepulauan Sangkarrang, seperti hasil perikanan, budidaya rumput laut, serta pelestarian hutan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, implementasi ekonomi biru belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama termasuk keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta minimnya dukungan teknologi dan anggaran untuk pengembangan sektor kelautan. Namun demikian, terdapat peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui strategi ekonomi berkelanjutan yang berfokus pada inovasi dan adaptasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

**Kata kunci:** *Blue Economy*, Kesejahteraan Berkelanjutan, Masyarakat Pesisir, Kepulauan Sangkarrang, Inovasi.

DOI: <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.8>

\*Correspondence: Nasir

Email: [nasir@unm.ac.id](mailto:nasir@unm.ac.id)

Received: 23-05-2024

Accepted: 22-06-2024

Published: 25-07-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the utilization of the potential of the *Blue Economy* in improving the welfare of coastal communities in a sustainable manner in the Sangkarrang Islands. The approach used is a qualitative method with a descriptive design. Data was collected through observation, interviews, and documentation, involving key informants from coastal communities and local governments. This research explores various blue economic potentials owned by the Sangkarrang Islands, such as fishery products, seaweed cultivation, and mangrove forest conservation. The results of the study show that although this region has abundant natural resources, the implementation of the blue economy has not been optimal. Some of the main obstacles include limited infrastructure, market access, and lack of technological and budget support for the development of the marine sector. However, there is a great opportunity to improve people's well-being through sustainable economic strategies that focus on innovation and local adaptation. This study recommends strengthening community capacity to manage natural resources efficiently and sustainably as well as increasing collaboration between the government, communities, and the private sector in encouraging inclusive and environmentally sound blue economic growth.

**Keywords:** *Blue Economy*, Sustainable Welfare, Coastal Communities, Sangkarrang Islands, Innovation.

## Pendahuluan

Kepulauan Sangkarrang merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui konsep *Blue Economy*. *Blue Economy*, atau ekonomi biru, adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang fokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Konsep ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di negara-negara maritim seperti Indonesia yang memiliki kekayaan laut yang melimpah (Sarson, 2022).

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Namun, banyak wilayah pesisir, termasuk Kepulauan Sangkarrang, masih menghadapi berbagai tantangan dalam memaksimalkan potensi tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir, yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan dan budidaya laut. Selain itu, masalah degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan turut memperburuk kondisi tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program untuk mendukung penerapan ekonomi biru, terutama melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan (Turisno, 2021). Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, yang merupakan salah satu sumber daya paling penting bagi ekonomi lokal. Dalam konteks Kepulauan Sangkarrang, penerapan ekonomi biru dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang masih dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kepulauan Sangkarrang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hasil laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum optimal, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Perubahan iklim, penangkapan ikan yang berlebihan, dan degradasi lingkungan telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan, sementara ketergantungan yang tinggi pada sumber daya laut menjadikan masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi global.

Melalui pendekatan ekonomi biru, wilayah pesisir diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan konsep *Blue Economy* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Sangkarrang secara berkelanjutan (Sunadji, 2023). Dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru di wilayah tersebut.

*Blue Economy* pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli pada tahun 2010 sebagai pendekatan inovatif untuk meningkatkan ekonomi global tanpa merusak lingkungan. Pauli menekankan bahwa *Blue Economy* harus berbasis pada efisiensi alam, di mana sumber daya kelautan digunakan dengan cara yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien.

Menurut Pauli, *Blue Economy* melibatkan prinsip zero waste, di mana setiap elemen dari ekosistem dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh, sektor perikanan dapat menghasilkan produk olahan dari ikan secara menyeluruh, mulai dari daging hingga bagian yang biasanya dibuang, seperti tulang dan kepala, yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah (SUMARMI, 2020). Ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Penerapan *Blue Economy* di Indonesia menjadi sangat relevan mengingat kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah. Beberapa sektor yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan ini termasuk perikanan, pariwisata bahari, energi laut, dan budidaya perairan. Namun, penerapan ekonomi biru tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah laut terluas di dunia, yang memberikan potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Sektor perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian pesisir, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah seperti Kepulauan Sangkarrang. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 12,5 juta ton per tahun, serta potensi budidaya perikanan sebesar 47 juta ton per tahun.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan berbasis laut, seperti energi gelombang laut, pasang surut, dan angin laut. Potensi ini masih sangat minim dimanfaatkan, namun dengan perkembangan teknologi, energi laut dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendukung penerapan *Blue Economy* di masa depan.

Meskipun potensi kelautan di Indonesia sangat besar, masih ada banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Salah satu kendala utama adalah overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang mengakibatkan penurunan populasi ikan di beberapa wilayah. Overfishing tidak hanya berdampak pada keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan mereka.

Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lingkungan juga menjadi ancaman besar bagi ekosistem pesisir. Kenaikan suhu air laut dan perubahan pola cuaca telah mempengaruhi distribusi ikan, sementara degradasi hutan mangrove dan terumbu karang akibat aktivitas manusia memperburuk situasi tersebut. Hal ini membuat masyarakat pesisir semakin rentan terhadap penurunan pendapatan dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan erosi pantai (Qian, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan *Blue Economy* di berbagai negara maritim. Di Asia, misalnya, negara-negara seperti India dan Filipina telah mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sambil menjaga kelestarian lingkungan. Di Indonesia, beberapa studi juga telah dilakukan untuk mengkaji potensi *Blue Economy*, terutama di wilayah-wilayah pesisir yang rentan terhadap kemiskinan dan perubahan iklim.

Sebuah penelitian oleh Harsono (2020) menunjukkan bahwa penerapan *Blue Economy* di Indonesia masih dalam tahap awal, dengan fokus utama pada sektor perikanan dan

pariwisata bahari. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan penerapan ekonomi biru, terutama melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penelitian lain oleh Rani & Cahyasari (2015) menekankan pentingnya inovasi dalam penerapan *Blue Economy*, terutama dalam hal pengolahan hasil laut dan pengembangan produk bernilai tambah. Mereka menyebutkan bahwa inovasi teknologi, seperti pengembangan produk olahan ikan dan budidaya rumput laut, dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir.

Salah satu prinsip utama dari *Blue Economy* adalah inklusi sosial, di mana semua anggota masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah pesisir yang rentan, dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Inklusi sosial menjadi penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena memberikan akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat terhadap sumber daya alam dan peluang ekonomi.

Penelitian oleh Satria (2015) menunjukkan bahwa inklusi sosial dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, seperti memberikan pelatihan keterampilan dan akses terhadap modal bagi para nelayan dan pembudidaya rumput laut. Ini akan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.

Penerapan *Blue Economy* diyakini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan, masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai sektor, seperti perikanan, budidaya laut, dan pariwisata bahari. Selain itu, penerapan prinsip zero waste dan inovasi dalam pengolahan hasil laut juga dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.

Sebuah penelitian oleh Sofyaningrum et al. (2023) menekankan bahwa penerapan *Blue Economy* harus didukung oleh kebijakan yang tepat serta dukungan infrastruktur yang memadai. Mereka mencatat bahwa salah satu kendala terbesar dalam penerapan ekonomi biru di Indonesia adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar global. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi pemanfaatan potensi *Blue Economy* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Sangkarrang secara berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam, dengan fokus pada pengalaman, pandangan, dan interaksi langsung dari masyarakat pesisir, pemerintah, dan pelaku usaha yang terlibat. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail bagaimana potensi ekonomi biru diterapkan di wilayah tersebut serta kendala dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu wilayah pesisir dengan potensi kelautan yang besar namun

masih belum dikelola secara optimal. Lokasi penelitian dipilih karena relevansi dengan fokus penelitian dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada hasil laut, seperti perikanan, budidaya rumput laut, dan produk mangrove.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat pesisir di lapangan, serta untuk memahami interaksi mereka dengan sumber daya alam yang ada. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, tokoh masyarakat, nelayan, pengusaha lokal, dan pejabat dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Teknik purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih kaya dan relevan dari individu yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam topik yang diteliti. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti laporan, statistik, dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan pengelolaan ekonomi biru di Kepulauan Sangkarrang.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disederhanakan dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana peneliti menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang memberikan gambaran lengkap tentang implementasi *Blue Economy* di Kepulauan Sangkarrang. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi dan mengonfirmasi temuan-temuan utama yang diperoleh, serta mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang relevan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik dari segi sumber maupun metode pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan memverifikasi data dari hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana konsep *Blue Economy* dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **Pembahasan**

Kepulauan Sangkarrang, yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor kelautan. Kepulauan ini terdiri dari beberapa desa pesisir yang penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan, pembudidaya rumput laut, serta pengelola hutan mangrove. Secara geografis, wilayah ini berhadapan langsung dengan Laut Makassar, yang memberikan potensi ekonomi besar dalam bidang perikanan tangkap, budidaya laut, dan industri olahan hasil laut. Namun, meskipun memiliki potensi alam yang signifikan, masyarakat pesisir di Sangkarrang masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, perubahan iklim,

serta keterbatasan modal dan teknologi menjadi penghambat utama dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat, mayoritas penduduk masih mengandalkan teknik penangkapan ikan tradisional yang kurang efisien dan sering kali tidak berkelanjutan. Mereka juga menghadapi masalah seperti penurunan jumlah hasil tangkapan akibat overfishing dan degradasi ekosistem laut, terutama mangrove yang berfungsi sebagai habitat alami berbagai spesies ikan. Meskipun demikian, beberapa sektor seperti budidaya rumput laut menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan Kepulauan Sangkarrang, yang tidak hanya dijual di pasar lokal tetapi juga diekspor ke luar negeri sebagai bahan baku industri kosmetik dan farmasi.

### *Implementasi Blue Economy di Kepulauan Sangkarrang*

Pemanfaatan potensi ekonomi biru di Kepulauan Sangkarrang masih berada dalam tahap awal. Konsep *Blue Economy*, yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya laut secara efisien, belum sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Salah satu prinsip dasar dari ekonomi biru adalah menciptakan nilai tambah dari setiap tahap produksi dan meminimalisir limbah, yang dapat menjadi solusi untuk masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Namun, praktik ini belum diimplementasikan secara luas di Sangkarrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Kepulauan Sangkarrang masih sangat bergantung pada praktik-praktik ekonomi konvensional yang sering kali tidak ramah lingkungan. Sebagai contoh, hutan mangrove yang penting bagi ekosistem laut banyak ditebang untuk dijadikan arang atau digunakan sebagai lahan pertanian, yang mengakibatkan kerusakan habitat ikan dan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Di sisi lain, pemerintah setempat telah mencoba mempromosikan konsep *Blue Economy* melalui program-program pemberdayaan masyarakat, namun program tersebut belum berjalan efektif karena minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan.

### *Faktor Penghambat Implementasi Blue Economy*

Ada beberapa faktor penghambat utama dalam penerapan *Blue Economy* di Kepulauan Sangkarrang. Pertama, keterbatasan infrastruktur menjadi masalah serius, terutama dalam hal akses transportasi dan fasilitas penyimpanan hasil laut. Infrastruktur yang tidak memadai mengakibatkan produk-produk hasil laut sering kali rusak sebelum sampai ke pasar. Hal ini menurunkan pendapatan nelayan dan pembudidaya rumput laut, karena mereka harus menjual hasil tangkapan atau produk budidaya mereka dengan harga yang lebih rendah.

Kedua, kurangnya teknologi dan pengetahuan modern juga menjadi kendala besar. Nelayan di Sangkarrang sebagian besar masih menggunakan metode penangkapan tradisional yang tidak efisien dan merusak lingkungan. Misalnya, penggunaan jaring-jaring yang terlalu kecil menyebabkan tertangkapnya ikan-ikan muda yang belum sempat

berkembang biak, sehingga mengancam keberlanjutan stok ikan. Di sisi lain, teknologi untuk mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah, seperti produk olahan ikan dan rumput laut, juga belum tersedia. Akibatnya, masyarakat hanya menjual produk mentah dengan harga yang relatif rendah, tanpa memaksimalkan potensi nilai tambah.

Ketiga, keterbatasan modal dan akses ke pasar juga menjadi penghambat signifikan. Banyak masyarakat pesisir di Sangkarrang yang tidak memiliki akses ke modal untuk mengembangkan usaha mereka. Perbankan dan lembaga keuangan masih sulit dijangkau oleh masyarakat pesisir karena persyaratan yang ketat dan kurangnya literasi keuangan. Di samping itu, akses ke pasar juga masih terbatas. Produk-produk hasil laut dari Sangkarrang sering kali hanya dipasarkan di tingkat lokal, dan hanya sebagian kecil yang dapat menembus pasar nasional atau internasional.

#### *Peluang dan Potensi Blue Economy*

Meskipun ada banyak kendala dalam implementasi *Blue Economy* di Kepulauan Sangkarrang, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peluang utama adalah pengembangan sektor pariwisata bahari. Kepulauan Sangkarrang memiliki keindahan alam yang mempesona, seperti pantai berpasir putih dan terumbu karang yang masih relatif terjaga. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari, yang tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat tetapi juga membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, budidaya rumput laut merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Rumput laut dari Kepulauan Sangkarrang memiliki kualitas yang baik dan permintaan global untuk produk ini terus meningkat. Dengan penerapan teknologi modern dan akses ke pasar yang lebih luas, rumput laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti kosmetik, bahan pangan, atau obat-obatan, yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada konsep inovasi dan adaptasi juga penting untuk dikembangkan. Dalam konteks ini, masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### *Inovasi dan Adaptasi sebagai Kunci Keberhasilan Blue Economy*

Inovasi dan adaptasi menjadi dua aspek kunci dalam keberhasilan implementasi *Blue Economy* di Kepulauan Sangkarrang. Inovasi dalam bidang teknologi perikanan dan pengolahan hasil laut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir. Sebagai contoh, penggunaan teknologi modern untuk budidaya rumput laut dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Di samping itu, inovasi dalam pengelolaan limbah laut, seperti mendaur ulang sisa-sisa rumput laut menjadi pupuk organik atau pakan ternak, dapat mengurangi limbah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adaptasi juga menjadi hal yang penting, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Masyarakat pesisir di Kepulauan Sangkarrang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan dan merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap masyarakat.

#### *Pengaruh Blue Economy Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*

Implementasi *Blue Economy* diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Sangkarrang. Dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dan efisien, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka dari sektor-sektor seperti perikanan, budidaya rumput laut, dan pariwisata bahari. Selain itu, penerapan teknologi dan inovasi juga dapat membuka peluang usaha baru yang sebelumnya tidak tersedia, seperti pengolahan produk laut menjadi produk bernilai tambah.

Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi antara berbagai pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah, misalnya, dapat memberikan bantuan dalam bentuk akses ke modal, pelatihan teknis, serta peningkatan infrastruktur, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dalam pengembangan industri olahan hasil laut dan pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepulauan Sangkarrang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan *Blue Economy*, namun masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal infrastruktur, teknologi, dan akses ke pasar. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor seperti pariwisata bahari, budidaya rumput laut, dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan penerapan konsep ekonomi biru yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat pesisir di Kepulauan Sangkarrang dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

#### **Simpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan potensi *Blue Economy* di Kepulauan Sangkarrang memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan, namun belum dioptimalkan sepenuhnya. Meskipun wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan, budidaya rumput laut, dan hutan mangrove, implementasi ekonomi biru masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap teknologi modern, keterbatasan modal, serta kurangnya akses ke pasar nasional dan internasional. Selain itu, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan eksploitasi hutan mangrove juga memperburuk kondisi lingkungan di wilayah tersebut.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor kunci seperti budidaya rumput laut dan pariwisata bahari. Pengembangan sektor-sektor ini, jika didukung oleh inovasi, adaptasi teknologi ramah lingkungan, serta

kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian dan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip *Blue Economy*, seperti zero waste dan inklusi sosial, juga dapat menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir melalui pelatihan dan pemberdayaan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan akses ke pasar dan modal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi *Blue Economy* di Kepulauan Sangkarrang dapat dioptimalkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Bidayani, A. (2016). *Blue Economy: Konsep dan Implementasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Harsono, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Blue Economy di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(3), 45-58.
- Halim, M. (2016). *Pengelolaan Sumber Daya Laut di Indonesia*. *Jurnal Kelautan*, 5(2), 33-47.
- Indarti, S., & Kuntari, W. (2015). *Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Indonesia*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 22-35.
- Izzati, A. & Affa, M. (2023). *Inklusi Sosial dan Blue Economy di Wilayah Pesisir*. *Jurnal Sosial Maritim*, 8(2), 91-102.
- Khaldun, M. (2017). *Dampak Blue Economy Terhadap Masyarakat Pesisir di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Kelautan*, 9(1), 12-24.
- Kustiwan, I., & Ramadhan, A. (2019). *Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Blue Economy di Asia Tenggara*. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(4), 66-78.
- Negara, S. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Wilayah Pesisir*. *Jurnal Ekonomi Maritim*, 6(3), 45-59.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Washington, D.C.: Paradigm Publications.
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). *Motivasi Indonesia dalam Menerapkan Model Blue Economy*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 15-29.
- Respatiningsih, T., Wulandari, N., & Hakim, S. (2020). *Inovasi dan Adaptasi dalam Penerapan Blue Economy di Masyarakat Pesisir*. *Jurnal Inovasi Sosial*, 11(2), 78-90.
- Qian, Q. (2024). Approaching circular economy through waste-to-blue hydrogen: Systems modeling and multi-objective optimization. *Chemical Engineering Journal*, 497. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.154660>
- Satria, A. (2015). *Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumber Daya Laut*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sofyaningrum, D., Priyono, B., & Hartini, W. (2023). *Tantangan dan Peluang Implementasi Blue Economy di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Biru*, 10(1), 32-49.
- Satria, Y. (2019). *Peran Ekonomi Biru dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Indonesia*. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 6(4), 20-35.
- Sarson, M. T. Z. (2022). The importance of property certificate ownership for gorontalo

- 
- coastal indigenous community as social welfare efforts. *AIP Conference Proceedings*, 2573. <https://doi.org/10.1063/5.0104314>
- Suaib, H. (2023). *Penerapan Blue Economy Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Timur*. *Jurnal Sosial Masyarakat*, 12(3), 55-67.
- SUMARMI. (2020). Community based tourism (cbt) to establish blue economy and improve public welfare for fishing tourism development in klatak beach, tulungagung, indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 31(3), 979-986. <https://doi.org/10.30892/gtg.31307-530>
- Sunadji. (2023). Quality management and industrialization of seaweed products as an effort to improve the welfare of coastal communities in the province of East Nusa Tenggara, Indonesia - A review. *AAAL Bioflux*, 16(5), 2488-2494. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85173012432&origin=inward>
- Turisno, B. E. (2021). ANALYSIS OF THE ROLE MODEL OF COASTAL AREA ARRANGEMENT ON IMPROVING COMMUNITY WELFARE THROUGH LEGAL PERSPECTIVE. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1-19. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85109894905&origin=inward>